

BAB II

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Grand Theory*

2.1.1. Teori kegunaan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (*decision-usefulness theory*). Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (*decision usefulness*) adalah Chambers. Ia mengatakan sebagai berikut:

Oleh karenanya, akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan. Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, system seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan (dalam Belkoui, 2001).

Staubus (2000) dalam Sukmaningrum (2012) menyatakan teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards (FASB)*, yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* yang berlaku

Amerika Serikat. Staubus (2003) dalam Sukmaningrum (2012) menyatakan pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain *a theory of accounting to investors*.

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan.

Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan *bias*, dan mewakili apa yang digambarkan. Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictivevalue*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu

juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*).

Indonesia sampai dengan saat ini, telah ada komite yang bekerja menyusun standar akuntansi pemerintahan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 308/KMK/2002 yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), akan tetapi yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah dengan Peraturan Pemerintah. Berbeda dengan GASB yang memiliki otoritas tertinggi, pemerintah Indonesia mengenal hirarki PABU dan SAK sebagai acuan utama yang memiliki otoritas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Undang-Undang No. 71 tahun 2010 mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam *SFAC No. 2*. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

2.1.2. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang mendasari tingkah laku dan premis (Donaldson dan Devis, 1997). Teori *Stewardship* didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan *principal*.

Teori *Stewardship* atau pengabdian berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Konsep teori ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab.

Dalam teori ini, *stakeholders* tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan lebih mendambakan pemenuhan kebutuhan tertinggi menurut hirarki kebutuhan Maslow, yaitu aktualisasi diri dan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan yang ditekuni. Hal ini menghindarkan adanya konflik kepentingan antara *stakeholders* dengan manajemen yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi. Manajer juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Salah satu hal yang mendasari ini adalah bahwa prinsip bahwa manajer merasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dengan cara yang bijaksana dan hati-hati demi melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas. Sehingga, mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi mereka, tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas inilah maka manajer tersebut merasa bahwa aktualisasi dirinya sudah terpenuhi dan dengan kepercayaan publik yang didapat, maka mereka tidak lagi menginginkan hal-hal materiil karena sejatinya kebutuhan mereka telah terpenuhi.

2.2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adapun fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur, yaitu (1) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*, (2) *having the internal parties review the information*, and (3) *taking corrective actions where necessary*.

Suatu entitas yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas) *me-review* informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif (Sugijanto, *et al* (1995:6) dalam Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Dalam peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Disamping undang-undang tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada intinya, semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ini memiliki ciri dengan indikator : a) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; b) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu; c) adanya kesesuaian antara

pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; dan d) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan (Dadang, 2006 dalam Sukmaningrum, 2012).

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik, dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah lebih partisipatif dan *pro poor*, mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Disamping itu, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan maka diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan akan terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

2.4 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*).

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

2.5 Nilai Informasi

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,

serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.6 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010).

Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008)

2.7 Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000).

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010).

2.8. Keandalan (*Reliability*) dan Ketepatanwaktuan (*Timeliness*) Pelaporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Ketepatanwaktuan merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai. Akibatnya, akan berdampak dalam proses pengambilan keputusan.

2.8 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber

daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dibagi menjadi:

1. Pengendalian Intern Akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2. Pengendalian Administrative

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: personel yang kompeten, pelimpahan tanggung jawab, pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait, pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

Menurut Wilkinson *et al.* , (2000), sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (a) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor, (b) pemisahan tugas, (c) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, (d) pemeriksaan independen atas kinerja, dan (e) penilaian yang tepat atas jumlah yang dicatat.

2.9. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau lingkungan eksternal adalah kondisi lingkungan yang berada diluar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana *strategic* dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan kualitas laporan keuangan meningkat atau menurun. Organisasi tidak dapat menghindar dari adanya pengaruh faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi itu sendiri, seperti kemajuan teknologi dan perubahan regulasi (Xu et al, 2003).

Perubahan regulasi dalam bidang akuntansi sektor publik yang paling utama adalah adanya perubahan sistem pencatatan dari single entry menjadi double entry. Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Negara, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang mewajibkan penerapan *accrual basis* paling lambat sampai dengan tahun 2015.

Dalam kondisi ekonomi global, organisasi lebih terbuka pada organisasi lain atau negara lain. Faktor eksternal memang tidak dapat dikontrol, tetapi dapat diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Orang-orang dalam organisasi harus waspada terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta dampaknya pada organisasi.

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Informasi

Pelaporan Keuangan Pemerintah

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011). Menurut Sulistyawati (2006) dalam Sutaryo (2011), SDM merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurut Guy *et al.* (2002), kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk

menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas meningkatkan kandungan nilai informasi pelaporan keuangan Pemda.

Indriasari (2008) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir provinsi Sumatera Selatan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapaistas sumberdaya manusia terhadap ketepatanwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan. PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan hubungan tersebut dihipotesiskan:

H_{1a}: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H_{2a}: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.10.2 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Nilai Informasi

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD. Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait.

Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti, 2010. Nugraha dan Susanti (2010)

menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H_{1b}: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H_{2b}: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.10.3. Hubungan Pengendalian Intern Akuntansi dan Nilai Informasi

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di laporan keuangan menunjukkan laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi. Apabila pengendalian intern dalam suatu organisasi telah dilaksanakan dengan baik, diharapkan laporan- laporan yang dihasilkan dapat disajikan tepat waktu bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan uraian dan temuan empiris tersebut, penulis mengajukan hipotesis:

H_{1c}: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H_{2c}: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.10.4. Hubungan Faktor Eksternal Dan Nilai Informasi Pelaporan

Keuangan Daerah

Dunia diluar organisasi (faktor eksternal), seperti perkembangan IT dan web, serta regulasi, mempunyai dampak yang signifikan pada operasi, sistem, dan kualitas informasi. Orang-orang dalam organisasi harus waspada terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta dampaknya pada organisasi, atau dalam kata lain, perubahan yang berasal dari luar organisasi harus diakomodasi dengan baik oleh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Dinamika perubahan yang terjadi harus tetap dikontrol agar tidak mengakibatkan sebuah kerugian atau potensi kerugian daerah dan/ atau negara. Xu *et al.* (2003) membuktikan bahwa faktor eksternal merupakan faktor kritis yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas, diduga terdapat hubungan positif antara faktor eksternal dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H_{1d}: Faktor eksternal berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H_{2d}: Faktor eksternal berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya hipotesis yang diajukan penulis akan dibagi menjadi dua kelompok dan pembagian didasarkan atas nilai informasi yang diuji, yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Hipotesis pertama* mengenai hubungan variabel independen yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan faktor eksternal dengan variabel dependen keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis pertama terdiri dari H_{1a} , H_{1b} , H_{1c} , H_{1d} .

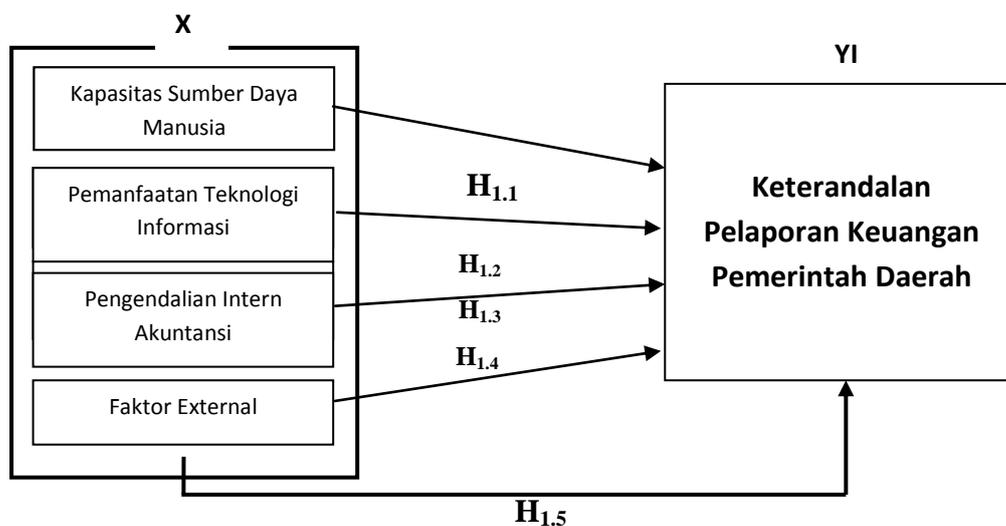
Berdasarkan keempat hipotesis tersebut, penting juga diketahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dikembangkan hipotesis H_{1e} berikut:

H_{1e} : Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan faktor eksternal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis kedua mengenai hubungan variabel independen yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan faktor eksternal dengan variabel dependen ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis pertama terdiri dari H_{2a} , H_{2b} , H_{2c} , H_{2d} . Berdasarkan kedua hipotesis tersebut, penting juga diketahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu dikembangkan hipotesis H_{2e} sebagai berikut:

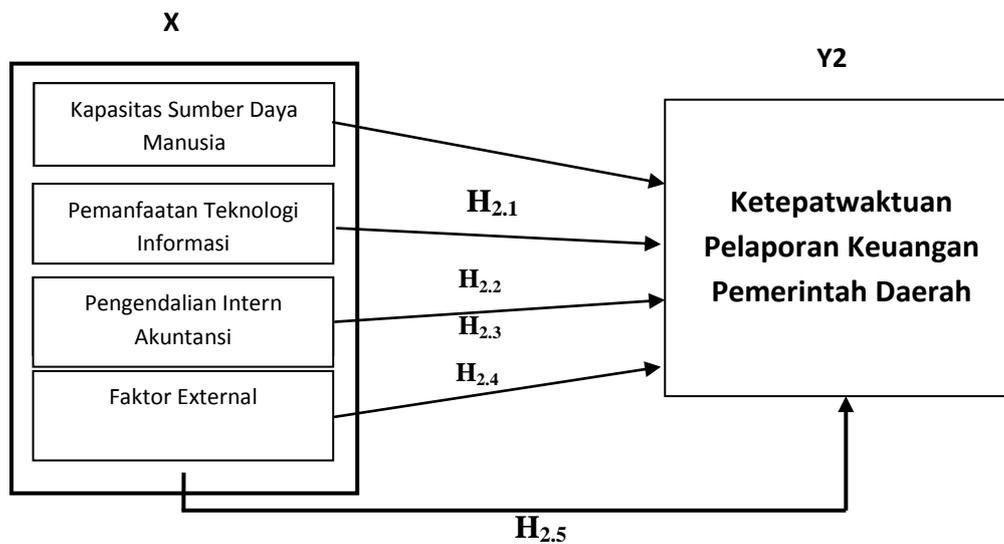
H_{2e} : Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan faktor eksternal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.11 Model Penelitian



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian Pengaruh Variabel X Terhadap Y1

Gambar 2.1 menunjukkan paradigma penelitian yaitu pengaruh Variabel X berupa Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan teknologi Informasi (X2), Pengendalian Intern Akuntansi (X3), dan Faktor Eksternal (X4) Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y1).



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian Pengaruh Variabel X Terhadap Y2

Gambar 2.2 menunjukkan paradigma penelitian yaitu pengaruh Variabel X berupa Kapabilitas Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan teknologi Informasi (X2), Pengendalian Intern Akuntansi (X3), dan Faktor Eksternal (X4) Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y2)

2.12 Penelitian Terdahulu

	Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak. (2007) Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah	1. Kapasitas Sumberdaya Manusia (X1) 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) 3. Pengendalian Intern akuntansi (X3) 4. Informasi Pelaporan Keuangan (Y)	Hipotesis diuji dengan <i>partial correlation</i> . Pengujian signifikansi dilakukan melalui <i>t-test</i> . H _{1d} dan H _{2c} akan diuji dengan menghitung koefisien korelasi berganda (<i>multiple correlation</i>). Pengujian signifikansi <i>F-test</i> .	kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun secara simultan.,
2	Imelda.2005. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.	1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) (X1) 2. Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Sampel: pegawai dinas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Uji hipotesis: regresi linear berganda	Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

3	Tantriani Sukmaningrum (2012) analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi sumber daya manusia (X1) 2. Sistem pengendalian intern (X2) 3. <i>Faktor eksternal</i> (Y) 	<p>Sampel: pegawai Pemerintah Daerah Kota Semarang</p> <p>Uji hipotesis: regresi linier berganda</p>	Kompetensi sumber daya manusia (X1) Sistem pengendalian intern (X2), <i>Faktor eksternal</i> (Y) berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang
4	Zuliarti (2012) Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada Pemerintah Daerah Kudus)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Sumberdaya Manusia (X1) 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) 3. Pengendalian Intern akuntansi (X3) 4. Informasi Pelaporan Keuangan (Y) 	<p>Sampel: pegawai dinas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus</p> <p>Uji hipotesis: regresi linier berganda</p>	kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun secara simultan.,
5	Fariziah Choirunisah (2008) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Kerja Kppn Malang Tahun 2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan sumber daya manusia (X1) 2. Dukungan Pimp. & Alat (X2) 3. Fasilitas (X3) 4. Organisasi Tim (X4) 5. Sistem Pengendalian (X5) 	<p>Sampel: Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Kerja Kppn Malang Tahun</p> <p>Uji hipotesis: regresi linier berganda</p>	Kemampuan sumber daya manusia (X1), Dukungan Pimp. & Alat (X2). Fasilitas (X3), Organisasi Tim (X4). Sistem Pengendalian (X5) Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Di Wilayah Kerja Kppn Malang Tahun 2008
6	Dinata, Anton Mulhar. 2004. Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya <i>Good Governance</i> di Era Otonomi Daerah. Sriwijaya, Indralaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan SDM (X1) 2. Penerapan Akuntansi (X2) 3. <i>Good Governance</i> di Era Otonomi Daerah. Sriwijaya (Y) 	<p>Sampel: pegawai dinas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Uji hipotesis: regresi linier berganda</p>	Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah berpengaruh terhadap Terciptanya <i>Good Governance</i> di Era Otonomi Daerah. Sriwijaya,
7	Donnelly, Mike, John F. Dalrymple, & Ivan P. Hollingsworth. 1994. "The Use and Development of Information Systems and Technology in Scottish Local Government".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi (X1) 2. Pengembangan Teknologi informasi (X2) 3. Pemerintahan yang baik di skotlandia 	<p>Sampel: pegawai pemerintah local di Skotlandia</p> <p>Uji hipotesis: regresi linier berganda</p>	Pengembangan sistem informasi dan pengembangan steknologi informasi berpengaruh terhadap pemerintahan yang baik di Skotlandia
8	Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi (X1) 2. Pemanfaatan TI (X2) 3. Kinerja Akuntan Publik (Y) 	<p>Sampel: pegawai Akuntan Publik</p> <p>Uji hipotesis: regresi linier berganda</p>	Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi Dan Pemanfaatan Ti Berpengaruh Terhadap Kinerja Akuntan Publik